

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

World Commission on Environment and Development (WECD), sejak tahun 1987 memberikan deskripsi dari pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka”.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan perbaikan yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, pertumbuhan ekonomi, serta semua aspek dalam kehidupan bernegara (Todaro, 2009). Banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan salah satunya disebabkan oleh terjadinya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Negara anggota G20, OECD, the World Bank, IMF, ADB, dan ASEAN telah sepakat bahwa perlu diberi perhatian penuh terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan (Nazliana dkk, 2013). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Setiawan (2015) bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebenarnya merupakan pertumbuhan yang mampu menciptakan pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Cara yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja mengeluarkan program pembangunan untuk menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 dengan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program pembangunan berkelanjutan tersebut akan diberlakukan bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun kedepan dengan mempunyai 17 tujuan dan 169 target (Suresh et al. 2015).

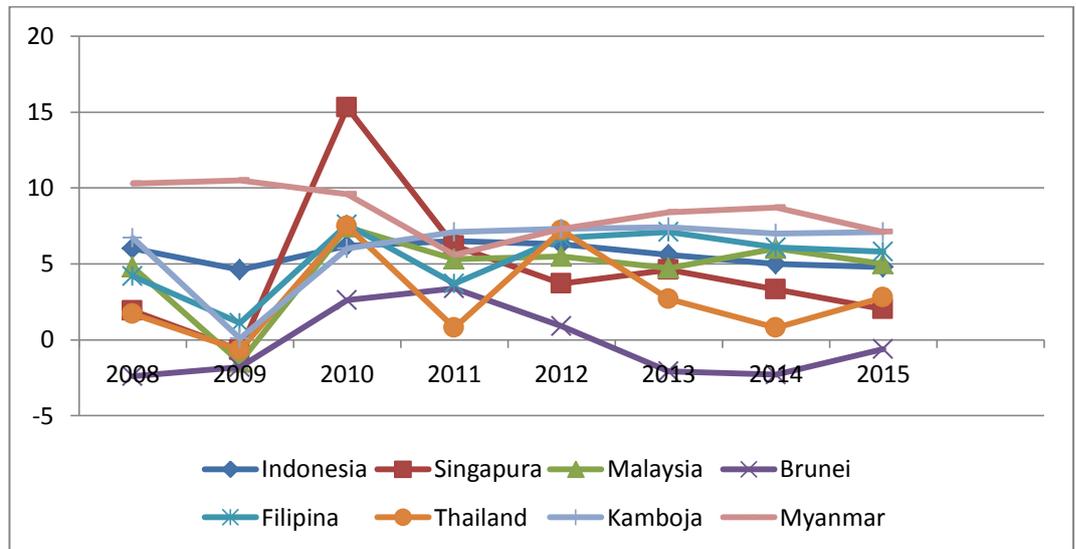
Pembangunan berkelanjutan sudah lama menjadi topik perbincangan di negara-negara Asia Tenggara dalam mengembangkan perekonomiannya. Munculnya program pembangunan berkelanjutan ini disambut dengan baik oleh ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), karena negara-negara ASEAN akan memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat dan memfokuskan kembali kerangka kerja untuk integrasi regional (ASEAN, 2016). Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali dalam *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012, kemudian pada 25-27 September 2015 dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York. Sejak saat itu SDGs ada untuk menggantikan MDGs sampai tahun 2030 yang upaya terbesarnya adalah untuk mengatasi kemiskinan (Suresh et al. 2015).

Selama 15 tahun yang lalu MDGs sudah menjalankan tugas dan dibuktikan dengan kemajuan dalam beberapa bidang penting, langkah besar

yang paling signifikan yang telah dilakukan MDGs adalah memerangi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya. Pengalaman MDGs memberikan pandangan baru untuk memulai perubahan pembangunan yang lebih berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan bagi generasi mendatang.

Komitmen yang ingin dicapai SDGs adalah untuk mengakhiri kemiskinan, SDGs berambisius untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang tertinggal dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. Adanya 17 tujuan yang ingin dicapai SDGs saling berhubungan oleh karena itu kunci keberhasilan pada satu tujuan akan menangani masalah yang lain (UNDP, 2016). Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN (2016), ASEAN mengakui pentingnya menciptakan sinergi antara ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam kerangka kerjasama ASEAN-PBB. Bagi ASEAN, pembangunan berkelanjutan adalah tujuan bersama bukan hanya ditingkat multilateral tetapi juga tingkat regional.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi ASEAN mencapai angka 4,25 persen, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Faktor pendukung utama pertumbuhan ekonomi di ASEAN didukung oleh tingkat konsumsi yang sangat besar di ASEAN. Tingginya tingkat konsumsi tersebut disebabkan oleh jumlah populasi negara hampir setengah dari penduduk dunia, yaitu sekitar 2,8 miliar penduduk atau sekitar 40 persen dari jumlah penduduk dunia (WorldBank, 2013).



GAMBAR 1.1

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara di ASEAN tahun 2008-2015 (Persen)

Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008-2009 menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di ASEAN pada tahun 2009 hanya mencapai angka 1,45 persen. Meskipun demikian dampak dari krisis dapat segera teratasi dengan adanya pemulihan ekonomi yang cepat dari negara ASEAN khususnya negara-negara berkembang.

Seperti yang dijelaskan dalam ASEAN (2016) pertumbuhan ekonomi yang stabil berada setelah tahun 2010 disebabkan oleh industri di sektor jasa yang belakangan semakin membaik bahkan menjadi tulang punggung perekonomian. Negara ASEAN menunjukkan ketahanan terhadap krisis keuangan global. ASEAN memiliki pasar yang terus berkembang, kurs mata uang yang stabil dan situasi regional yang damai sehingga menjadi daya tarik bagi pebisnis dan investor.

Demirguc-Kunt *et al.* (2008) menyatakan keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya kestabilan suatu sistem keuangan yang ada di masyarakat serta sistem keuangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat secara luas, karena inti dari proses pembangunan itu sendiri adalah sektor keuangan yang efektif dan stabil. Pembangunan sektor keuangan, terutama sektor perbankan, dapat meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif (Ummah, 2015).

Dalam (Booklet Keuangan Inklusif, 2014) menjelaskan akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting bagi keterlibatan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian. Namun industri keuangan yang berkembang pesat saat ini belum tentu memiliki akses ke keuangan yang memadai. Sedangkan institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu perlu diadakannya peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan secara tepat, nyaman, serta informatif.

Keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, *financial inclusion* telah dibahas dalam forum G20, OECD, AFI, APEC dan ASEAN (Booklet Keuangan Inklusif 2014). Strategi keuangan inklusif muncul karena rendahnya akses

keuangan oleh masyarakat yang diakibatkan dari tingkat pendapatan yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat akan keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang dianggap tinggi serta jauhnya jangkauan bank dari pemukiman masyarakat. Tujuan dari strategi keuangan inklusif adalah untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan.

Untuk mewujudkan program keuangan inklusif yang berkelanjutan diperlukan koordinasi antara bank dengan kementerian dan insitusi terkait dalam rangka pengembangan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program, agar program keuangan inklusif yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan sinergis. Dengan koordinasi yang baik diharapkan tujuan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai secara maksimal. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat yang penting bagi keberhasilan suatu negara, meskipun demikian belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan yang inklusif.

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin akses yang sama terhadap peluang yang diciptakan untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin (Ali dan Son, 2007).Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang

memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang.

Sebuah sistem keuangan yang inklusif diinginkan karena berbagai alasan. Pertama, memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien produktif. Kedua, akses untuk tepat jasa keuangan secara signifikan dapat meningkatkan manajemen sehari-hari keuangan. Dan ketiga, sistem keuangan *all-inclusive* dapat membantu mengurangi pertumbuhan sumber kredit informal (seperti rentenir) yang sering cenderung eksploitatif. Dengan demikian, sistem keuangan *all-inclusive* meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dengan menyediakan jalan untuk praktek penghematan aman dan nyaman dengan memfasilitasi berbagai macam jasa keuangan yang efisien (Sarma, 2010).

Sarma dan Pais (2011) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif suatu negara dapat disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur. Beberapa faktor pada keadaan sosial ekonomi antara lain jumlah angka melek huruf, pendapatan per kapita, populasi desa dan pengangguran. Sementara itu yang termasuk dalam kategori infrastruktur dapat berupa jumlah jaringan jalan aspal, jumlah pengguna internet, jumlah pengguna telepon dan lain sebagainya.

Sanjaya (2014) mengatakan inklusi keuangan berdampak pada pengentasan kemiskinan karena masalah utama yang rentan dihadapi oleh masyarakat miskin adalah kebutuhan finansial. Oleh karena itu, keuangan inklusi akan menjadi akses yang disediakan untuk mengangkat permasalahan kemiskinan yang ada dinegara-negara maju maupun berkembang yang ada di ASEAN.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk menganalisis keuangan inklusif dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di ASEAN. Negara yang akan diteliti oleh penulis adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, dan Myanmar. Sedangkan dua negara anggota ASEAN seperti Laos dan Vietnam tidak masuk dalam penelitian dikarenakan kesulitan data untuk peneliti peroleh. Faktor terkait yang akan diteliti dalam mempengaruhi keuangan inklusif adalah faktor sosial ekonomi yang diwakilkan oleh angka melek huruf dan GDP Per kapita, serta faktor infrastruktur yang diwakilkan oleh jalan aspal.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan maka penelitian membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data yang digunakan untuk menganalisis keuangan inklusif sebagai pencapaian SDGs yaitu berdasarkan hasil perhitungan dari dimensi penetrasi, ketersediaan dan penggunaan jasa perbankan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya indeks keuangan inklusif sangatlah beragam, dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada faktor angka melek huruf, infrastruktur (jalan aspal) dan GDP Per kapita dengan tahun perhitungan 2008-2015.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat Keuangan Inklusif di ASEAN?
2. Bagaimanakah pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN?
3. Bagaimanakah pengaruh Infrastruktur (Jalan Aspal) terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN?
4. Bagaimanakah pengaruh GDP Per Kapita terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN?
5. Bagaimanakah pengaruh Indeks Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan di ASEAN?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan indeks keuangan inklusif dalam pencapaian SDGs di negara ASEAN. Namun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Mengetahui tingkat Keuangan Inklusif di ASEAN.
2. Mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN.
3. Mengetahui pengaruh Infrastruktur (Jalan Aspal) terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN.
4. Mengetahui pengaruh GDP Per Kapita terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN.
5. Mengetahui pengaruh Indeks Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan yang ada di ASEAN.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan keuangan inklusif dan memberikan gambaran terkait keuangan inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tinjauan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan, pemerataan distribusi pendapatan maupun peluang/kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagai implikasi dari keuangan inklusif.

3. Manfaat bagi penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk lebih mendalami dan memperluas pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusifitas keuangan disuatu negara.